

NASKAH PUBLIKASI

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH MENGANGKAT BUDAYA
MELAYU**

(Suatu Kajian di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016-2017)

Oleh:
Ely Kusrini
20150520167

Telah disetujui dan disahkan sebagai naskah publikasi sesuai kaidah
penulisan karya ilmiah

Dosen Pembimbing

Dr. Inu Kencana Syafie, M.Si.
NIK : 19520614201210163 101

Mengetahui,



Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik

Dr. Amin Purwaningsih, S.IP., M.Si
NIK: 19690822199603 163 038



Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan

Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si
NIK: 19660828199403 163 025

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH MENGANGKAT BUDAYA MELAYU

(Suatu Kajian di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016-2017)

Oleh : Ely Kusrini

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosian dan Ilmu Politik UMY

E-mail : elyabdullah28@gmail.com

SINOPSIS

Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mengangkat budaya melayu memiliki tiga bentk kebijakan. Yang pertama program, pada tahap ini pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sudah banyak melakukan program dalam mengangkat budaya melayu. Mereka melakukan berbagai macam even misalnya seperti lomba pantun, lomba puisi yang mengangkat kearifan lokal melayu, menulis cerita rakyat, langgam melayu dan lain sebagainya. Kemudian mereka melakukan upaya perekaman terhadap nilai budaya. Yang kedua tujuan, pada tahap tujuan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki Tujuan dalam mengembangkan budaya melayu, yang dimana bertujuan untuk bagaimana budaya melayu itu sendiri bisaa terlestarikan. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Tujuan penelitian ini adalah 1) mengetahui kabijakan pemerintah daerah mengangkat budaya melayu di kabupaten Kepulauan Meranti; 2) mengetahui apa kenala yang akan dihadapi dalam

mengangkat budaya melayu. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah mengangkat budaya melayu masih ada kendala dalam mengangkat budaya melayu, salah satu kendalanya yaitu belum tercapainya seluruh kebudayaan. Dimana muatan lokal budaya melayu merupakan salah satu mata pelajaran tentang budaya melayu, dan muatan lokal budaya melayu ini belum di akui secara nasional. Dalam pelaksanaan muatan lokal budaya ini pun tidak mudah, ada beberapa aspek yang menjadi kendala. Pertama, berkenaan dengan guru dimana pengakuan pemerintah terhadap mata pelajaran muatan lokal ini bahwasannya belum di tetapkan budaya melayu sebagai muatan lokal itu bagaimana. Disamping itu untuk urusan kebudayaan kita kekurangan pengalokasian dana, belum memiliki regulasi yang hampir se Kabupaten kota dan se Riau yang berkenaan dengan pelestarian kebudayaan.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki berbagai ragam kebudayaan, baik kebudayaan internasional, kebudayaan lokal, maupun kebudayaan asal asing sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945. Kondisi Indonesia yang menjelaskan bahwa adat melayu riau merupakan seperangkat nilai merupakan sebagai negara kepulauan, dan memiliki berbagai suku bangsa serta pola pikir yang beragam, seni, agama, pengetahuan, bahasa, memiliki ciri khas kebudayaan lokal yang berbeda-beda dengan karakteristik yang unik.

Dalam Perda No 5 Tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Kepulauan Meranti bahwa Adat Melayu merupakan kekayaan

daerah tidak berwujud (intangible) yang tak ternilai sehingga perlu dilestarikan, dikembangkan, dan dilindungi dengan Peraturan Daerah. Proses globalisasi dapat mengakibatkan pergeseran tata nilai adat dan budaya, tidak terkecuali tata nilai Adat dan Budaya Melayu. Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberi jaminan serta amanat kepada setiap orang untuk menjaga melestarikan serta mengimplementasikan tata nilai budaya lokal yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.

Perkembangan kehidupan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari berbagai suku bangsa dan golongan sejenisnya, seperti golongan asli Melayu setempat,

Jawa, Tionghoa, Minangkabau, Bugis, Makasar dan dari daerah lainnya. Golongan tersebut saling membaaur dan saling berhubungan sangat baik satu sama lain, sehingga membentuk suatu persatuan sosial maupun budaya itu sendiri. Dalam kehidupan sosial budaya masyarakat selalu membentuk budaya Melayu Islam dengan berbusana melayu (Teluk Belanga bagi kaum pria dan busana muslimah bagi kaum wanita) pada hari atau acara-acara tertentu. Begitu juga di sekolah anak-anak didik dibiasakan mengenal dan mengenakan busana melayu pada hari-hari tertentu.

Tugas dan amanah untuk mempertahankan dan menanamkan budaya melayu mendorong pemerintah harus bekerjasama dengan Lembaga Adat Melayu Riau dan Majelis Ulama

Kabupaten Kepulauan Meranti. Yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat melayu agamis islam, kita ketahui bahwa pada era globalisasi saat ini bukan hal yang mudah untuk mempertahankan dan menanamkan budaya pada anak-anak zaman sekarang. Dimana tantangan dan godaan serta pengaruh budaya global hegimoni barat sudah mewabah. Masalah dekedensi moral adalah salah satu akibat yang dikarenakan oleh ketidak siapan masyarakat dalam menghadapi tatangan global. Persoalan tersebut bisa saja bermuara pada pengalaman sistem nilai yang terdapat dalam masyarakat itu sendiri. Saat ini sistem nilai tradisional mulai diganti oleh sistem nilai modern sehingga sistem referensi tidak berkiblat pada nilai tradisi, akan tetapi pada nilai-nilai

modernitas dengan logika berfikir yang berbeda.

Peran sentral orang tua pada dunia budaya Melayu sangat jelas menjadi entitas budaya yang harus dilaksanakan, mungkin tidak berlebihan jika disebut sebagai ritual wajib yang dilakukan oleh orang tua dalam mempersiapkan anaknya menjelang *akil baligh*. Sehingga siap menghadapi dinamika kehidupan, yang dimana bisa kita lihat sekarang pengaruh budaya barat sangat berkembang cepat. Ritual-ritual tersebut banyak terdapat dalam naskah atau historiografi melayu, seperti dalam kitab *sulalat al Salam* Sultan Manshur Shah dari Malaka disebutkan member nasihat kepada Raja Ahmad, atau istilah lainnya adalah *nobat* dalam tradisi Melayu, sebagai legitimasi

perpindahan kekuasaan dari Sultan sebelumnya kepada para pewaris tahta kerajaan. Tradisi ini sesungguhnya tidak hanya terdapat dalam lingkungan istina, akan tetapi ditengah-tengah masyarakat sebagai bentuk transformasi nilai-nilai kehidupan. *Pulang-memulangkan* dalam rentetan acara pernikahan. Budaya Melayu adalah bentuk nyata sebagai *nobat*, transformasi nilai dalam keluarga tradisional (sunandar, 2015).

Perubahan tata nilai dalam masyarakat dimana kehidupan bukan sekedar melanjutkan “naluri” masa lalu, tetapi telah menjadi arena negosiasi berbagai tata nilai yang tidak hanya lokal dan nasional, akan tetapi global sifatnya. Negosiasi yang terjadi diawali dengan apa yang disebut dengan masyarakat modern atau

kebarat-baratan, sehingga tradisi-tradisi barat yang awalnya tidak ditemukan dalam tradisi Timur (terutama dalam kehidupan Melayu) mudah ditemukan dalam perilaku orang Melayu. Seperti, cara berpakaian wanita Melayu sarat dengan nilai estetika, etika dan nilai-nilai islam (baju kurung atau bentuk lainnya dengan catatan tidak mencolok dan menutup aurat) mulai berubah dalam bentuk yang lebih terbuka, modern sesuai pada zaman sekarang ini. Hal ini seperti ini mengarah pada apa yang dianggap sebagai sesuatu yang “norak, kiampungan, ketinggalan zaman”, sehingga harus beralih penampilan yang trendi, modern, dan sesuai dengan zaman. Perubahan seperti terjadi karena kurangnya rasa ketertarikan pada anak-anak zaman sekarang, sehingga mereka lebih

tertarik trend-trend pada saat ini (sunandar, 2015).

Kecendrungan ini terjadi sejalan dengan melemahnya peran pusat-pusat kebudayaan sebagai pengendali dan pewaris sistem nilai. Dalam kehidupan Melayu, pusat-pusat kebudayaan tradisional selalu mengedepankan adat-istiadat sebagai sistem nilai yang menjadi pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku. Orang tua-tua Melayu sebenarnya telah melihat munculnya gejala yang dapat menyebabkan tersisihnya budaya lokal dan terabaikannya nilai-nilai luhur. Hal ini terjadi karena sebagian orang Merlayu sudah semakin jauh dari kebudayaan leluhurnya sehingga mereka dapat dengan mudah menerima kebudayaan asing tanpa tapis dan kemudian menelannya mentah-

mentah. Kini budaya melayu berada dipersimpangan jalan. Banyak masalah dan tantangan yang dihadapi sehingga tidak salah jika slogan “*tak kan Melayu hilang di bumi*” (afandi, 2018).

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat di amati. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah daerah mengangkat kembali budaya melayu dan apa kendala yang di hadapi dalam mengangkatr budaya melayu di Kabupaten KepulauanMeranti tahun 2016-2017.

C. Kerangka Teori

1. Kebijakan

Kebijakan ditulis dalam bahasa Inggris dengan *Policy*, sedangkan kebijaksanaan ditulis dalam Bahasa Inggris dengan *Wisdom*, perbedaannya adalah kalau kebijakan berasal dari atasan tertinggi misalnya pemerintah pusat, maka pada tingkat pimpinan daerah atau yang setingkat berada di bawahnya dapat mengubahnya sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan secara empiris. Hal ini berlaku bagi pemerintahan sipil, tetapi tidak berlaku bagi pemerintahan militer terutama dalam keadaan darurat perang, karena kalau ternyata di kemudian hari mengalami kekeliruan akan berakibat fatal pada keamanan dan ketertiban, itulah sebabnya pada

kekeliruan mengambil keputusan maka dua tingkat ke atas mendapat sasaran hukuman (syafiie, 2013, pp. 355-356).

Kebijakan merupakan hal penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Kebijakan dapat digunakan sebagai suatu acuan dalam rangka mensejahterakan rakyat. Oleh karena dalam merumuskan suatu kebijakan, sebaiknya memperhatikan kebutuhan rakyat. Kebijakan dibuat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. dalam hal ini kebijakan yang dimaksud mencakup keseluruhan dari lingkup individual hingga lingkup pemerintahan. Pengertian kebijakan tetap harus mempunyai pengertian mengenai apa yang sebenarnya dilakukan, ketimbang apa yang

diusulkan dalam tindakan mengenai suatu persoalan tertentu.

Kebijakan menurut Charles O. Jones terdiri dari beberapa komponen yaitu :

1. Isi kebijakan yang pertama adalah tujuan, dimana tujuan yang dimaksud adalah keinginan yang akan di capai.
2. Plan atau proposal merupakan suatu yang spesifik untuk mencapai tujuan.
3. Program, yaitu upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan.
4. Keputusan, yaitu tindakan untuk menentukan tujuan,

membuat rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program.

5. Dampak, yaitu konsekuensi dari suatu program dalam masyarakat.

2. Budaya

Budaya adalah asumsi, nilai, keyakinan, dan norma berperilaku yang menjadi karakteristik seseorang yang bisa membedakan cara berfikir, tindakan sosial, dan bahkan mental (Simarmata, 2018). Budaya merupakan tingkat yang paling tinggi dan paling abstrak dari adat-istiadat. Hal itu disebabkan karena budaya merupakan konsep-konsep mengenai sesuatu yang ada dalam pikiran sebagian besar dari masyarakat yang mereka anggap bernilai, berharga, dan penting dalam

hidup sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman yang memberi arah dan orientasi pada kehidupan masyarakat. Walaupun budaya berfungsi sebagai pedoman hidup manusia dalam masyarakat, tetapi sebagai konsep, budaya itu bersifat sangat umum, mempunyai ruang lingkup yang sangat luas.

Namun, Karena sifatnya yang umum, luas maka nilai-nilai budaya dalam suatu kebudayaan berada dalam daerah emosional dari jiwa individu. Selain itu, sejak kecil para individu sudah di terapkan dalam kehidupannya, sehingga konsep-konsep tersebut sudah sangat berakar dalam jiwa mereka. Itulah sebabnya nilai-nilai budaya dalam suatu kebudayaan tidak bisa digantikan dengan nilai-nilai budaya lainnya

dalam waktu yang sangat singkat, dengan cara mendiskusikannya secara rasional. Dalam tiap masyarakat baik yang kompleks maupun yang sederhana, ada sejumlah nilai budaya satu sama lain yang berkaitan sehingga menjadi suatu sistem. Dimana sistem tersebut sebagai pedoman dari konsep-konsep ideal dalam budaya yang memberi motivasi kuat terhadap arah kehidupan.

D. Hasil Penelitian

1. Kebijakan Pemerintah Daerah Mengangkat Kembali Budaya Melayu di Kabupaten Kepulauan Meranti

Kebijakan pemerintah daerah mengangkat budaya melayu merupakan hal penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Kebijakan dapat digunakan sebagai suatu acuan dalam

rangka mensejahterakan rakyat. Oleh karena itu dalam merumuskan suatu kebijakan, sebaiknya memperhatikan kebutuhan rakyat. Kebijakan dibuat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. dalam hal ini kebijakan yang dimaksud mencakup keseluruhan dari lingkup individual hingga lingkup pemerintahan. Pengertian kebijakan tetap harus mempunyai pengertian mengenai apa yang sebenarnya dilakukan, ketimbang apa yang diusulkan dalam tindakan mengenai suatu persoalan tertentu.

Jadi berikut ini adalah analisi yang di lakukan oleh peneliti dalam penelitian mengenai Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mengangkat Budaya Melayu di Kabupaten Kepulauan Meranti dengan

menggunakan metode pengumpulan data yakni di lakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi agar mendapatkan informasi-informasi dan data-data yang di butuhkan. Kebijakan pemerintah daerah dalam mengangkat budaya melayu di Kabupaten Kepulauan Meranti meliputi hal sebagai berikut:

a. Program

Pada tahap ini pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sudah banyak melakukan program dalam mengangkat budaya melayu. Mereka melakukan berbagai macam even misalnya seperti lomba pantun, lomba puisi yang mengangkat kearifan lokal melayu, menulis cerita rakyat, langgam melayu dan lain sebagainya. Kemudian mereka melakukan upaya

perekaman terhadap nilai budaya, pemerintah juga berupaya menegaskan kepada pemerintah untuk terus bangkit dan mengangkat khazanah-khazanah budaya melayu. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti akan segera menetapkan peraturan bupati tentang muatan lokal budaya melayu, untuk tahap awal pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti akan membuat Pergub dan kedepannya akan di lanjutkan membuat Perda.

b. Tujuan

Pada tahap tujuan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki Tujuan dalam mengembangkan budaya melayu, yang dimana bertujuan untuk bagaimana budaya melayu itu sendiri bisaa terlestarikan. Pada tahap proses peletarian ada tiga hal yang sangat

penting diantaranya yaitu perlindungan, pengembangan, pemanfaatan. Perlindungan adalah proses terpenting dalam pelestarian, unsur ini mempengaruhi unsur-unsur lain yang pada akhirnya di harapkan menghasilkan umpan balik pada upaya perlindungan. Unsur ini langsung berhubungan langsung dengan fisik yang menjadi bukti masa lalu. Sebaliknya unsur pengembangan lebih banyak berhubungan dengan potensi-potensi yang menyatu dengan benda, bangunan, struktur atau situs yang di pertahankan. Kegiatannya bukan dalam bentuk konservasi, restorasi atau pemeliharaan objek misalnya, melainkan upaya pengembangan informasi, penyusunan baha edukasi, atau sebagai objek wisata. Hal ini berbeda dengan kegiatan ada unsur pemanfaatan yang

juga menyentuh fisik dari budaya seperti halnya perlindungan, bedanya adalah pada unsur ini kegiatannya terbatas pada upaya revitalisasi atau adaptaasi untuk menyesuaikan kebutuhan baru dengan tetap mempertahankan keaslian objek.

c. Manfaat

Pada tahap ini berkembangnya budaya sangatlah penting khususnya budaya melayu dengan tetap melstarikan nilai-nilai yang sudah tertanam pada masyarakat sejak lama. Dengan pelestarian budaya menjadikannya tetap ada ditengah era zaman modern sekarang ini dan tidak luntur nilai-nilainya oleh perkembangan zaman. Ini merupakan salah satu manfaat dari mengembangkan budaya melayu. Selain dari pada itu, dengan

berkembangnya budaya melayu bermanfaat memperkaya kebudayaan nasional sehingga keanekaragaman budaya kita semakin unik dan kiannberwarna. Berkembangnya budaya melayu akan menarik lebih banyak lagi wisatawan mancanegara karena mereka tertarik untuk mempelajari sekaligus menikmati sebagai studi, seni dan budaya suatu daerah. Seni budaya merupakan produk kreatifitas manusia sehingga dapat menambah daftar referensi untuk mengembangkan seni dan budaya baru yang lebih unik dan kreatif. Menjaga agar budaya tidak punah dan dipercaya oleh daerah lain bahkan negara lain.

2. Kendala yang di hadapai dalam mengakat budaya melayu di Kabupaten Kepulauan Meranti

Pada tahap ini masih ada kendala dalam mengangkat budaya melayu, salah satu kendalanya yaitu belum tercapainya seluruh kebudayaan. Dimana muatan lokal budaya melayu merupakan salah satu mata pelajaran tentang budaya melayu, dan muatan lokal budaya melayu ini belum di akui secara nasional. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah ikut beesama-sama pemerintah Provinsi Riau sejak di laksanakan workshop muatan lokal budaya melayu Riau tahun 2010 oleh pemerintah Provinsi melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sejak saat itu di Meranti sudah melaksanakan pembelajaran muatan lokal budaya melayu Riau walaupun belum menyeluruh. Dalam pelaksanaan muatan lokal budaya ini pun tidak mudah. Ada beberapa aspek

yang menjadi kendala. Pertama, berkenaan dengan guru dimana pengakuan pemerintah terhadap mata pelajaran muatan lokal ini bahwasannya belum di tetrangkan budaya melayu sebagai muatan lokal itu bagaimana.

Akibatnya guru-guru yang mengajar mata pelajaran muatan lokal budaya melayu Riau tidak masuk ke dalam angka kredit. Yang kedua, guru-guru yang mengajar mata pelajaran muatan lokal budaya melayu Riau tidak akan mungkin mendapatkan sertifikasi karena mata pelajarannya belum di akui secara nasional. Perjuangan-perjuangan agar supaya muatan lokal budaya melayu Riau di akui, telah di lakukan berbagai macam upaya di antaranya adalah pertemuan yang di lakukan oleh pemerintah

Provinsi Riau beserta perwakilan dari Kabupaten melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Lembaga Adat Melayu Riau, memperjuangkan agar muatan lokal ini dapat di akui.

Pada tagun 2019 Kabupaten Kepulauan Meranti akan melakukan workshop muatan lokal budaya melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan akan melibatkan pengawas pendidikan, korwil, kepala sekolah, seniman dan budayawan melayu serta guru-guru lesenian atau budaya melayu. Dengan tujuan akir supaya pelaksanaannya serentak dan tidak akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan. Sebelumnya Kabupaten Kepulauan Meranti sudah pernah melakukan workshop muatan lokal budaya melayu, akan tetapi tidak

melibatkan pengawas, kepala sekolah, guru, seniman budayawan dan ini menjadi kendala. Karna dalam tatanan kebijakan di sekolah yang di libatkan hanya guru, dan guru tidak mampu menerapkan tanpa bantuan pihak lain seperti kepala sekolah salah satunya. Maka dari itu di tahun 2019 akan di adakan workshop muatan lokal budaya melayu dan melibatkan semua komponen.

Disamping itu untuk urusan kebudayaan kita kekurangan pengalokasian dana, dan kita sangat berterimakasih di satu sisi kepala pemerintah melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan memberikan celah besar bagaimana perkembangan kebudayaan sampai ke tingkat daerah. Di sisi lain, dalam mengangkat budaya

melayu ada tantangan yang harus di lalui oleh pemerintah daerah yaitu seperti belum memiliki regulasi yang hampir se Kabupaten kota dan se Riau yang berkenaan dengan pelestarian kebudayaan.

E. Penutup

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat di simpulkan dari keseluruhan urain bab-bab yang telah dikemukakan sebagai berikut:

1. Kebijakan pemerintah daerah mengangkat kembali budaya melayu di Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2016-2017

Kebijakan pemerintah daerah ngangkat budaya melayu merupakan hal penting dalam menjalankan roda

pemerintahan. Kebijakan dapat digunakan sebagai suatu acuan dalam rangka mensejahterakan rakyat. Oleh karena itu dalam merumuskan suatu kebijakan, sebaiknya memperhatikan kebutuhan rakyat. Kebijakan dibuat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun kebijakan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mengembangkan budaya melayu meliputi beberapa hal. Yang pertama ada program, dimana program tersebut akan memberikan tujuan serta manfaat dalam mengembangkan budaya melayu itu sendiri.

2. Kendala yang di hadapi dalam mengangkat budaya melayu di Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2016-2017

Dalam mengangkat budaya melayu masih ada kendala salah satunya yaitu belum tercapainya seluruh kebudayaan. Dimana muatan lokal budaya melayu merupakan salah satu mata pelajaran tentang budaya melayu, dan muatan lokal budaya melayu ini belum di akui secara nasional. Disisi lain kurangnya pengalokasian dana terhadap kebudayaan karena kebudayaan sedikit di anak tirikan, kemudian terbatasnya tenaga ahli dalam hal budaya melayu.

b. Saran

Adapun saran yang penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah seharusnya lebih memperhatikan baik itu dalam bentuk dana maupun sumber daya manusia dalam hal pengembangan budaya melayu.

2. Seharusnya Dinas Kebudayaan dalam melakukan workshop muatan lokal budaya melayu Riau kedepannya harus melibatkan orang-orang yang seharusnya terlobat agar kedepannya tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti punahnya budaya melayu.

F. Daftar Pustaka

Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian (suatu pendekatan praktik)*. jakarta: rineka cipta.

Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antrropologi*. jakarta: rineka cipta.

Muhadjir, N. (1996). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. yogyakarta: rakesarasin.

Syafie, I. K. (1994). *Sistem Pemerintah Indonesia*. jakarta: rineka cipta .

Syafiie, I. K. (2013). *Ilmu Pemerintahan*. jakarta: bumi aksara.

Syafiie, I. K. (2009). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. jakarta: cv mandar maju.

afandi, s. a. (2018). *Kapabilitas Lembaga Adat Melayu Riau Dalam Mewujudkan Visis Riau 2020*.

Darmawan, C., Malasari, Y. (2017). *Budaya Adat Pengantin Melayu Riau Dalam Pengembangan Budaya Kewarganegaraan*. humanika.

Mifta Farid, A. R. (2017). *Kewenangan Pemerintah Daerah dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Potensi Daerah*. lentera hukum.

Simarmata, J. (2018). *Praktek Manajemen Kinerja Dan Kinerja Oganisasi Pada Universitas Batanghari: Peran Budaya Organisasi Sebagai Variabel Moderator. manajemen dan sains.*

Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Nomor 12
Tahun 2009

Undang-Undang Dasar Nomor 5
Tahun 2014

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2014